

Strategi Pengawas Spesialis K3 Penanggulangan Kebakaran Dalam Pengawasan Dan Pelatihan Unit Penanggulangan Kebakaran Dalam Upaya Meminimalisir Bahaya Kebakaran Di Tempat Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Sapto Suseno, Eka Askafi, Deby Santyo Rusandy
Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri
Email: suseno.sapto@gmail.com

Abstract

Fires can damage the environment as well as health problems resulting from the origin of the fire and material losses. Implementation of occupational safety and health as an effort to prevent and deal with accidents including fire. These efforts include prevention, control, observation and extinguishing of fires and include protection of life and human safety as well as protection of assets. This study aims to identify and analyze the strategy for the role of oversight and training of fire prevention units by K3 specialist supervisors at the Office of Manpower and Transmigration of East Java Province, Working Area of Korwil 2 Malang. The data used in this study are primary data obtained from field observations, focus group discussions, in-depth interviews. The data analysis technique used is Data Reduction, Data Presentation and then draws conclusions that have been checked for the validity of the data through triangulation. The result of this study is a SWOT analysis to determine the role of K3 specialist supervisors.

Keywords: *Supervisory Role, K3, SWOT analysis*

A. Pendahuluan

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor penting yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan ataupun instansi terkait. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan meniadakan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang perlu menghabiskan banyak biaya (cost) suatu instansi terkait, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam faktor ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Penerapan K3 tidak semata – mata hanya menguntungkan pihak karyawan namun juga dapat menghasilkan kinerja karyawan yang lebih produktif sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan atau instansi. Oleh sebab itu, penerapan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab karyawan semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab pihak instansi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan bersama.

Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan tersedianya lapangan kerja, meningkatkan mutu pembangunan serta upaya mensejahterakan masyarakat. Namun yang sering terjadi adalah kurangnya upaya penerapan serta pencegahan terhadap risiko terjadinya bahaya di tempat kerja yang salah satunya adalah risiko terjadinya kecelakaan ditempat kerja. Salah satu bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja adalah terjadinya kebakaran.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Bab II Pasal 2 tentang ruang lingkup keselamatan kerja, bahwa aspek keselamatan kerja harus diimplementasikan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indo-nesia. Salah satu aspek keselamatan kerja tersebut adalah keselamatan dari bahaya kebakaran maupun ledakan. Kebakaran merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang sangat merugikan semua pihak, baik pihak pengelola atau pengguna gedung, pemilik gedung, maupun masyarakat yang berada di sekitar gedung. Kebakaran merupakan salah satu kecelakaan yang kerap terjadi. Kebakaran dapat merusak lingkungan serta gangguan kesehatan akibat dari asal kebakaran serta kerugian material. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan dan penanggulan-gan kecelakaan termasuk kebakaran

Upaya tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, pengamatan dan pemadaman kebakaran dan meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta kekayaan. Upaya penanggulangan dan pecegahan kebakaran salah satunya adalah dengan menyediakan instalasi APAR dan hydrant.

Namun demikian selain penyediaan alat, penting juga untuk dilakukan sosialisasi (*sharing knowledge*) dan praktik lapangan oleh seorang ahli K3 pemadam kebakaran yang menguasai kemampuan dalam memadamkan dan mengendalikan kebakaran pada sebuah gedung perusahaan. Karena berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih banyak perusahaan yang hanya menyediakan alat pemadam kebakaran saja, akan tetapi untuk pengoperasiannya masih belum bisa. Yang terakhir juga masih ada beberapa perusahaan / tempat kerja belum menerapkan standar sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah strategi peran pengawasan dan pelatihan unit penanggulangan kebakaran oleh pengawas spesialis K3 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Korwil 2 Malang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran analis K3 spesialis kebakaran, apa saja factor pendukung dan penghambat peran analis K3 spesialis kebakaran serta strategi apa yang tepat melalui analisis SWOT.

Penelitian Verawaty, Irene Svinarky, Zulkifli, Sudianto pada tahun 2020 dengan judul "Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan kesehatan Kerja (K3). Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang memberikan gambaran, kemudian menelaah, menjelaskan dan juga menggunakan analisis data dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan. Dimana dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Penyakit dapat saja ditimbulkan dari tempat kerja dan dapat dilihat di pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pada saat melakukan pekerjaan, oleh sebab itu pekerja harus menjaga keselamatannya dan kesehatannya dengan mengikuti SOP yang telah dibuat oleh perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan bertujuan untuk memonitoring agar perusahaan dapat memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu sama-sama mengidentifikasi K3 pada proyek konstruksi dan mengidentifikasi penyebabnya dan memberikan solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama mengidentifikasi terkait bagaimana peran pengawas spesialis K3 dan sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan keadaan nyata di lapangan. Adapun perbedaannya adalah peneliti juga membahas tentang sosialisasi dan pelatihan bagi unit penanggulangan kebakaran dalam rangka meminimalisir resiko kebakaran tempat kerja.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Lettyzia Juliaudrey Tampubolon pada tahun 2015 dengan judul Efektivitas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai Upaya Mewujudkan Budaya K3. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Proses analisa data dilakukan dengan menggabungkan data primer dan sekunder yang didapat, selanjutnya melakukan pengkategorian menggunakan tema substantif yang disiapkan, dan menata kembali untuk dilakukan interpretasi serta penarikan kesimpulan. Kemudian validitas data diuji dengan triangulasi data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Berdasarkan penyajian serta analisis dan interpretasi data, hasil penelitian tentang kinerja pengawasan Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan dalam mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya mewujudkan budaya K3, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata pengawasan yang dilakukan belum efektif. Hal itu dikarenakan syarat mencapai keefektifan dari kedua pendekatan tersebut belum terpenuhi. Pengukuran terhadap efektivitas pengawasan dinsosnaker dalam mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pencapaian tujuan dan pendekatan sistem. Persamaannya adalah dalam metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah focus yang diteliti.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang memberikan gambaran, kemudian menelaah, menjelaskan dan juga menggunakan analisis data dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* (FDG) dan juga wawancara secara mendalam dengan narasumber. Selain itu juga dilaksanakan observasi dan kemudian data yang ada dianalisis dan dicek keabsahannya melalui uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

C. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan dengan tim Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sesuai tupoksi bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan bina penegakan hukum pada perusahaan di seluruh Jawa Timur. Untuk pelaksanaan pembinaan ini dibagi menjadi beberapa wilayah kerja. Khususnya yang peneliti alami adalah di Wilayah Kerja Korwil 2 Malang. Beberapa permasalahan yang ada pada Wilayah Kerja Korwil 2 Malang ini antara lain:

1. Permasalahan yang pertama adalah sejumlah perusahaan / tempat kerja telah menerapkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, namun masih terjadi kebakaran disejumlah pabrik tersebut. Hal ini dimungkinkan karena sumber bahaya kebakaran yang kurang terpantau. Hal ini dimungkinkan karena Belum adanya alarm kebakaran automatic.
2. Permasalahan yang kedua adalah APAR sudah tersedia, akan tetapi sumber daya manusia yang ada belum mampu mengoperasikan secara optimal. Penyediaan APAR termasuk ke dalam sistem tanggap darurat kebakaran yang merupakan hal penting untuk mengantisipasi adanya keadaan darurat yang disebabkan oleh kebakaran. Penerapan sistem tanggap darurat dalam hal ini pemasangan APAR, tidak harus menunggu terjadinya keadaan darurat kebakaran namun, sebelumnya harus dibuat untuk mengantisipasi adanya kebakaran dan untuk meminimalkan kerugian serta mencegah terjadinya korban jiwa.
3. Permasalahan ketiga adalah selain penyediaan alat, penting juga untuk dilakukan sosialisasi (*sharing knowledge*) dan praktik lapangan oleh seorang ahli K3 pemadam kebakaran yang menguasai kemampuan dalam memadamkan dan mengendalikan kebakaran pada sebuah gedung perusahaan. Karena berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih banyak perusahaan yang hanya menyediakan alat pemadam kebakaran saja, akan tetapi untuk pengoperasiannya masih belum bisa.
4. Permasalahan Yang terakhir adalah masih ada beberapa perusahaan / tempat kerja belum menerapkan standar sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan SOP yang ada dan beberapa permasalahan yang sudah di inventarisir tersebut, maka peran pengawas K3 spesialis Kebakaran dalam rangka meminimalisir bahaya kebakaran di tempat kerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan oleh pengawas K3 spesialis kebakaran adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan secara intensif terhadap tim penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Sosialisasi dan Pelatihan yang dilaksanakan meliputi Tindakan Preventive, Repressive, dan Rehabilitative sebagai berikut:

- a. Tindakan Preventive, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran dengan maksud menekan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran. Contohnya yaitu dengan melakukan Identifikasi terhadap sumber-sumber terjadinya kebakaran seperti: Karena Faktor Manusia (Gas LPG, Sambungan Listrik, Lilin), Faktor Alam (Petir,

Gempa Bumi, Petir, Gunung Meletus), Faktor Penyalaan Sendiri (Timbunan Sampah, Penyimpanan Bahan Kimia yg mudah terbakar). Jika kita dapat melakukan identifikasi terhadap penyebab kebakaran tersebut hendaknya kita juga dapat melakukan tindakan pengendalian bahaya kebakaran secara dini dengan tim tanggap darurat di tempat kerja seperti menyediakan perlengkapan darurat kebakaran spt APAR, Hydrant, Selimut api, Alarm Kebakaran, Pelatihan-pelatihan simulasi keadaan darurat, Jalur-jalur evakuasi, Asembly Point dan harus juga dilengkapi dengan Prosedur Kerja Keadaan Darurat kebakaran.

- b. Tindakan Repressive, yaitu tindakan yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran dengan maksud untuk mengurangi/ memperkecil kerugian yang timbul sebagai akibat dari kebakaran.
- c. Tindakan Rehabilitative, yaitu usaha-usaha yang dilakukan setelah terjadi kebakaran, dengan maksud evaluasi dan menganalisa peristiwa kebakaran untuk mengambil langkah-langkah berikutnya, antara lain:
 - 1) Membuat pendataan
 - 2) Menganalisa tindakan-tindakan yang telah dilakukan
 - 3) Menyelidiki faktor-faktor penyebab kebakaran sebagai bahan pengusutan.
 - 4) Pemulihan dan penyampaian ke Publik

Namun demikian, dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini juga ada kendala yang dihadapi, seperti kurangnya SDM dengan jumlah perusahaan yang banyak, serta kurangnya minat dan inisiatif dari perusahaan untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pemadaman kebakaran.

2. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan

Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka transparansi, akuntabilitas kinerja, dan keseragaman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan serta SK Kadisnakertrans Prov. Jatim Nomor : 560/400/108.5/VII/2020 Tanggal 14 Juli 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kadisnakertrans Prov. Jatim Nomor : 560/244/IV/2018 Tata Kerja Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Jawa Timur (SOP Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3), dimana salah satunya adalah penetapan target kegiatan pemeriksaan ketenagakerjaan oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebanyak 5 (lima) pemeriksaan perusahaan perbulan dan kegiatan pengujian objek K3 oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sebanyak 8 (delapan) riksa-uji obyek K3 perbulan.

Meskipun masih terjadi pandemi pada tahun 2021 kewajiban perusahaan memeriksa objek K3 yang ada di perusahaan untuk menjaga keselamatan pekerja dan juga keberlangsungan usaha tetap menjadi prioritas. Sehingga dalam hal ini sangat penting peran pengawas K3 spesialis kebakaran untuk memastikan bahwa lingkungan kerja / perusahaan ini benar-benar memenuhi SOP, bukan hanya sekedar melengkapi sesuai yang dipersyaratkan agar dapat diterbitkan surat keterangan memenuhi K3 oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

3. Tugas-tugas ahli K3 bidang penanggulangan kebakaran

Selain melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pemadam kebakaran dan juga pengawasan ketenagakerjaan, berikut secara spesifik tugas-tugas ahli K3 bidang penanggulangan kebakaran:

- a. Mendukung penerapan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan kebakaran;
- b. Menentukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan kondisi lingkungan perusahaan dan beragam faktor risikonya;
- c. Evaluasi berbagai sistem penanggulangan kebakaran, baik yang aktif maupun pasif;
- d. Memahami sistem pengendalian risiko kebakaran spesifik di perusahaan yang bisa mempengaruhi keselamatan kerja;
- e. Mendukung pemeriksaan dan pelacakan konstruksi bangunan serta kontribusi material terhadap keamanan dan keselamatan kerja;
- f. Menentukan dan mengajukan anggaran pencegahan dan penanggulangan kebakaran ke pihak perusahaan atau pengurus;
- g. Bekerja sama dengan berbagai instansi lain terkait penanggulangan dan penanganan kebakaran.

Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan External Factor Analysis Summary (EFAS) dilakukan untuk menentukan variabel-variabel yang termasuk dalam strength, weakness,

opportunity, threats (SWOT) yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

A. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

1. Kekuatan (Strenght)

- a. Tingkat pemahaman dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat dalam mengantisipasiadanya kebakaran.
- b. Penggunaan peralatan pemeriksaan obyek bangunan yang sesuai standar untuk mendukung pelaksanaan tugas pencegahan kebakaran.
- c. Perusahaan diwajibkan meriksaujikan objek K3 agar dapat dikeluarkan surat keterangan memenuhi K3.
- d. Terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Perusahaan / Tempat Kerja.
- e. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) menghadapi kebakaran.
- f. Rekrutmen pengawas K3 spesialis penanggulangan kebakaran untuk memaksimalkan proses pembinaan dan pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran.
- g. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatasnya jumlah pengawas K3 spesialis penanggulangan kebakaran, sehingga jadwal pembinaan dan jadwal pelatihan masih belum maksimal.
- b. Terjadinya perpindahan tempat tugas pengawas K3 spesialis penanggulangan kebakaran.
- c. Jangkauan lokasi yang cukup luas pada setiap korwil.

B. External Factor Analysis Summary (EFAS)

1. Peluang (Opportunities)

- a. Penggunaan bahan material bangunan yang sesuai standar, memiliki ketahanan kebakaran dan desain bagunan yang aman dari risiko kebakaran.
- b. Perusahaan / tempat kerja yang melengkapi ketersediaan alat pemadam kebakaran.
- c. Lebih sering diadakan pelatihan penggunaan APAR untuk pemadaman api awal kebakaran.
- d. Semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian pekerja terhadap ancaman bencana kebakaran.
- e. Personil yang menguasai ilmu kebakaran dilapangan.

2. Ancaman (Threat)

- a. Kurangnya komitmen dari tempat kerja untuk program pencegahan kebakaran, seringnya hanya untuk memenuhi persyaratan mendapat izin saja.
- b. Meningkatnya obyek bangunan yang berpotensi atau rawan terjadi kebakaran.
- c. Meningkatnya waktu pemadaman atau lamanya durasi kejadian kebakaran berlangsung.
- d. 1Karyawan Perusahaan yang belum memahami tentang prosedur penggunaan alat kebakaran.
- e. Bencana kebakaran gedung yang diakibatkan oleh perbuatan manusia akibat kurang edukasi.

Strategi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dianalisis dengan menggunakan analisa secara SWOT. Matriks ini menghasilkan empat solusi alternative strategi sesuai dengan potensi serta kondisi internal dan eksternal. Strategi SO (Strength x Opportunities) ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST (Strength x Threats) ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WO (Weakness x Opportunities) ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT (Weakness x Threats) ini didasarkan pada

kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman.

Pembahasan

Salah satu kategori kecelakaan kerja adalah terjadinya kebakaran, dimana kejadian kebakaran dapat membawa konsekuensi mengancam keselamatan jiwa pekerja serta berdampak bagi masyarakat luas. Pertimbangan hukum, tujuan dan sasaran K3 adalah dalam rangka melindungi pegawai dan orang lain, menjamin kelancaran kegiatan yang ada di perusahaan, menjaga aset serta kepedulian terhadap lingkungan. Beberapa hal yang mendasar khususnya yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kebakaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970
2. Kepmenaker RI No. 186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
3. Permenaker RI No. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Wewenang & Kewajiban Ahli K3.

Sesuai dengan Kepmenaker RI No: KEP-186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran BAB II tentang Pembentukan Unit Penanggulangan Kebakaran, pada pasal 5 BAB II dijelaskan bahwa Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis. Sehingga dapat diartikan bahwa peran pengawasan K3 tidak hanya pengawasan namun juga dalam hal pembinaan, sebagaimana juga tertuang dalam Undang-undang no.1 tahun 1970 pasal 4 dan Undang-undang no.14 tahun 1969. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu aktifitas untuk menilai kesesuaian persyaratan yang telah ditentukan, dalam hal ini persyaratan K3 penanggulangan kebakaran. Sedangkan pembinaan mencakup; pembentukan, penerapan, dan pengawasan. Pembinaan secara teratur diharapkan mampu meminimalisir resiko kebakaran di tempat kerja. Tentunya hal ini juga untuk melindungi pekerja dari bahaya kebakaran yang dapat mengancam nyawa. Selain itu ruang lingkup Pengawasan K3 Penanggulangan Kebakaran meliputi beberapa hal antara lain:

1. Identifikasi potensi bahaya (Fire hazard identification) yaitu Identifikasi terhadap sumber-sumber potensi bahaya kebakaran
2. Analisa Resiko (Fire risk assessment) yaitu Pembobotan terhadap tingkat resiko dari potensi bahaya yang telah diidentifikasi
3. Sarana proteksi kebakaran aktif yaitu alat atau instalasi yang disiapkan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran, missal; detector, springkler, hydrant dll.
4. Sarana proteksi kebakaran pasif yaitu berupa alat, sarana atau metode pengendalian penyebaran kebakaran, missal dengan pemilihan bahan-bahan bangunan yang tahan api.

Dalam mencegah kebakaran juga harus memperhatikan perkiraan tingkat keparahan apabila terjadi kebakaran, terdapat 3 faktor yaitu:

1. Tingkat kemudahan terbakarnya (Flammability)
2. Jumlah dan kondisi bahan yang mudah terbakar tersebut
3. Tingkat paparan dan besaran nilai objek yang terancam

Dalam melaksanakan tugas dengan maksimal, maka harus diketahui faktor pendukung dan penghambat peran pengawas K3 spesialis kebakaran. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tersebut maka dilaksanakan analisis SWOT. Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari empat elemen dalam metode analisis ini, yakni Strength yang berarti kekuatan, Weakness yang berarti kelemahan, Opportunities yang berarti kesempatan, dan Threats yang berarti ancaman. Dari keempat komponen analisa SWOT tersebut, bisa terlihat dengan jelas bahwa metode analisis ini secara efektif akan mempermudah para pengawas K3 spesialis kebakaran dalam rangka perencanaan strategi yang mana mencakup pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mungkin timbul secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat menentukan strategi yang tepat di masa depan agar peran pengawas K3 spesialis kebakaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil analisa SWOT yang telah dilaksanakan, kekuatan yang ada pada peran pengawan analis K3 spesialis kebakaran antara lain tingkat pemahaman dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat dalam mengantisipasi adanya kebakaran, penggunaan peralatan pemeriksaan obyek bangunan yang sesuai standar untuk mendukung pelaksanaan tugas pencegahan kebakaran, terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Perusahaan /Tempat Kerja, dan standar SOP yang mewajibkan perusahaan / tempat kerja mendapatkan surat keterangan memenuhi K3. Kekuatan tersebut juga merupakan faktor pendukung dari internal bagi pengawas K3 spesialis kebakaran dalam melaksanakan perannya. Selain kekuatan (strength) faktor internal adalah kelemahan (weakness), dimana dari hasil analisis SWOT dapat diketahui beberapa kelemahan dari peran pengawan analis K3 spesialis kebakaran antara lain terbatasnya jumlah pengawas K3 spesialis penanggulangan kebakaran, sehingga jadwal pembinaan dan jadwal pelatihan masih belum maksimal, terjadinya perpindahan tempat tugas pengawas K3 spesialis penanggulangan kebakaran dan jangkauan lokasi yang cukup luas pada setiap korwil. Kelemahan ini menyebabkan peran pengawas spesialis K3 kurang maksimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan di wilayah kerjanya.

Selain itu, hasil analisis SWOT ini juga dapat menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari lingkungan eksternal. Faktor pendukung ini berasal dari peluang (oportunities), dimana ada beberapa peluang peran pengawas K3 spesialis kebakaran antara lain penggunaan bahan material bangunan yang sesuai standar, memiliki ketahanan kebakaran dan desain bagunan yang aman dari risiko kebakaran, perusahaan / tempat kerja yang melengkapi ketersediaan alat pemadam kebakaran, semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian perusahaan terhadap ancaman bencana kebakaran sehingga lebih sering diadakan pelatihan penggunaan APAR untuk pemadaman api awal kebakaran, semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian pekerja terhadap ancaman bencana kebakaran, dan personil yang menguasai ilmu kebakaran dilapangan. Faktor penghambat yang berasal dari lingkungan eksternal berasal dari ancaman (threath) antara lain kurangnya komitmen dari tempat kerja untuk program pencegahan kebakaran, seringnya hanya untuk memenuhi persyaratan mendapat izin saja, meningkatnya obyek bangunan yang berpotensi atau rawan terjadi kebakaran, meningkatnya waktu pemadaman atau lamanya durasi kejadian kebakaran berlangsung, karyawan Perusahaan yang belum memahami tentang prosedur penggunaan alat kebakaran, dan bencana kebakaran gedung yang diakibatkan oleh perbuatan manusia akibat kurang edukasi. Dalam analisis SWOT yang telah dilaksanakan, maka dapat memfokuskan pada satu kombinasi dari dua poin SWOT untuk menentukan langkah strategis. Kombinasi yang pertama adalah fokus pada kekuatan dan peluang (SO), dimana strategi ini untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

Beberapa strategi SO yang dirumuskan antara lain mengajukan usulan perekrutan tenaga pengawas k3 spesialis kebakaran yang menguasai ilmu menghadapi kebakaran bangunan gedung, jangkauan lokasi Korwil yang dipersempit dengan tujuan agar proses pengawasan maupun pembinaan menjadi lebih intens, memperketat SOP untuk penerbitan Surat Keterangan memenuhi K3 bagi perusahaan / tempat kerja, melaksanakan update aplikasi pelaporan sehingga memudahkan bagi Pengawas K3 Spesialis Kebakaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Strategi yang kedua fokus pada kelemahan dan ancaman (WT). Strategi ini dilakukan untuk mendapat alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk meminimalisasi ancaman eksternal. Strategi yang dapat dirumuskan antara lain, melaksanakan simulasi rutin kebakaran bangunan gedung dengan keterlibatan semua pihak baik Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur maupun Perusahaan / Tempat Kerja dan memastikan tepat sasaran dan melaksanakan review dan monitoring secara rutin kepada perusahaan / tempat kerja terhadap standarisasi pencegahan kebakaran.

Kemudian strategi yang ketiga adalah fokus pada kekuatan dan ancaman (ST). Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Strategi yang dapat dirumuskan antara lain perlunya standar operasional atau pengamatan langsung terhadap kondisi peralatan, meningkatkan kerjasama pengawasan dan pengendalian antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Perusahaan / Tempat Kerja, dan menyediakan anggaran khusus kegiatan pengurangan risiko penanggulangan bahaya kebakaran.

Strategi yang terakhir adalah Fokus pada kelemahan dan peluang (WO). Strategi ini dilakukan dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Strategi yang dapat dirumuskan adalah perekrutan Tenaga yang menguasai ilmu menghadapi kebakaran bangunan gedung dan membentuk tim siaga tanggap darurat kebakaran yang dibekali dengan pendidikan dan pelatihan.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah strategi mana yang paling tepat untuk digunakan, tentunya setiap strategi akan bekerja secara efektif apabila tepat sasaran. Untuk membantu dalam memilih strategi yang tepat, ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan, salah satunya adalah efisiensi. Dimana efisiensi ini dapat diartikan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Dengan demikian diharapkan strategi yang dipilih ini nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secara efisien dengan menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian serta dihubungkan dengan hasil analisis dan pembahasannya, secara garis besar dibuat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pengawas K3 spesialis kebakaran telah dilaksanakan sesuai SOP, namun demikian masih kurang maksimal dan masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti sumber bahaya kebakaran yang kurang terpantau yang dimungkinkan karena belum adanya alarm kebakaran automatic, kemudian alat pemadam kebakaran sudah tersedia akan tetapi sumber daya manusia yang ada belum mampu mengoperasikan secara optimal, kurangnya sosialisasi (sharing knowledge) dan praktik lapangan oleh seorang ahli K3 pemadam kebakaran yang menguasai kemampuan dalam memadamkan dan mengendalikan kebakaran pada sebuah gedung perusahaan, dan yang terakhir ada beberapa perusahaan / tempat kerja belum menerapkan standar sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat peran pengawas K3 spesialis kebakaran maka menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisa SWOT yang telah dilaksanakan, kekuatan yang ada pada peran pengawan analisis K3 spesialis kebakaran antara lain tingkat pemahaman dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat dalam mengantisipasi adanya kebakaran, penggunaan peralatan pemeriksaan obyek bangunan yang sesuai standar untuk mendukung pelaksanaan tugas pencegahan kebakaran, terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Perusahaan / Tempat Kerja, dan standar SOP yang mewajibkan perusahaan / tempat kerja mendapatkan surat keterangan memenuhi K3. Kelemahan dari peran pengawan analisis K3 spesialis kebakaran antara lain terbatasnya jumlah pengawas K3 spesialis penanggulangan kebakaran, sehingga jadwal pembinaan dan jadwal pelatihan masih belum maksimal, terjadinya perpindahan tempat tugas pengawas K3 spesialis penanggulangan kebakaran dan jangkauan lokasi yang cukup luas pada setiap korwil. Kelemahan ini menyebabkan peran pengawas spesialis K3 kurang maksimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan di wilayah kerjanya. Sementara itu peluang peran pengawas K3 spesialis kebakaran antara lain penggunaan bahan material bangunan yang sesuai standar, memiliki ketahanan kebakaran dan desain bangunan yang aman dari risiko kebakaran, perusahaan / tempat kerja yang melengkapi ketersediaan alat pemadam kebakaran, semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian perusahaan terhadap ancaman bencana kebakaran sehingga lebih sering diadakan pelatihan penggunaan APAR untuk pemadaman api awal kebakaran, semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian pekerja terhadap ancaman bencana kebakaran, dan personil yang menguasai ilmu kebakaran dilapangan. Faktor penghambat antara lain kurangnya komitmen dari tempat kerja untuk program pencegahan kebakaran, seringnya hanya untuk memenuhi persyaratan mendapat izin saja, meningkatnya obyek bangunan yang berpotensi atau rawan terjadi kebakaran, meningkatnya waktu pemadaman atau lamanya durasi kejadian kebakaran berlangsung, karyawan Perusahaan yang belum memahami tentang prosedur penggunaan alat

kebakaran, dan bencana kebakaran gedung yang diakibatkan oleh perbuatan manusia akibat kurang edukasi.

3. Berikut beberapa alternatif strategi perbaikan ke depan diantaranya adalah:
 - a. Strategi SO yang dirumuskan antara lain mengajukan usulan perekrutan tenaga pengawas k3 spesialis kebakaran yang menguasai ilmu menghadapi kebakaran bangunan gedung, jangkauan lokasi Korwil yang dipersempit dengan tujuan agar proses pengawasan maupun pembinaan menjadi lebih intens, memperketat SOP untuk penerbitan Surat Keterangan memenuhi K3 bagi perusahaan / tempat kerja, melaksanakan update aplikasi pelaporan sehingga memudahkan bagi Pengawas K3 Spesialis Kebakaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - b. Strategi WT yang dapat dirumuskan antara lain, melaksanakan simulasi rutin kebakaran bangunan gedung dengan keterlibatan semua pihak baik Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur maupun Perusahaan / Tempat Kerja dan memastikan tepat sasaran dan melaksanakan review dan monitoring secara rutin kepada perusahaan / tempat kerja terhadap standarisasi pencegahan kebakaran.
 - c. Strategi ST yang dapat dirumuskan antara lain perlunya standar operasional atau pengamatan langsung terhadap kondisi peralatan, meningkatkan kerjasama pengawasan dan pengendalian antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Perusahaan /Tempat Kerja, dan menyediakan anggaran khusus kegiatan pengurangan risiko penanggulangan bahaya kebakaran.
 - d. Strategi WO yang dapat dirumuskan adalah perekrutan Tenaga yang menguasai ilmu menghadapi kebakaran bangunan gedung dan membentuk tim siaga tanggap darurat kebakaran yang dibekali dengan pendidikan dan pelatihan.

E. Referensi

Buku

- Anggoro, M. Linggar. 2002. Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Effendy, Nasrul. 1998. Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Friedman, M. Marilyn. 1998. Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik. Jakarta: EGC.
- Gaffar, Vanessa. 2007. Customer Relationship Management and Marketing PublicRelation. Bandung: Alfabeta.
- Manulang, Sendjun. 1995. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Husni, Lalu. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 1993. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa Edisi 2. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Musthafa. 2017. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Prinst, Darwan. 2000. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Bencana. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Sahab, Syukri. 1997. Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Bina SDM.
- Saidah. 2017. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaksmo, M. 1997. Manajemen Keselamatan Kerja. Surabaya: Pustaka.
- Suliyanto. 2018. Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suma'mur P.K. 1996. Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suryani. 2007. Psikologi Kognitif. Surabaya: Dakwah Digital Press.

- Sutrisno, and Kusmawan Ruswandi. 2007. *Prosedur Keamanan, Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Sukabumi: Yudhistira.
- Tasliman, Ahmad. 1993. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogya.
- Tunggal, Hadi Setia. 2013. *Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta. Harvarindo
- Widayatun, Tri Rusmi. 1999. *Ilmu Perilaku M.A. Buku Pengayaan Mahasiswa Akper*. Jakarta: Sagung Seto.
- Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Ruang Lingkup Keselamatan Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 1970. Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39. Kementerian Perindustrian.
- Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.23/MEN/2002 tentang pokok-pokok Pengawasan di Bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-186/Men/1999 tentang pokok-pokok Pengawasan di Bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Jurnal

- Verawaty, Irene, Zulkifli, Sudianto. 2020. Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan kesehatan Kerja (K3). *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 9 No. 4.
- Tampubolon, Lettyzia J. 2015. Efektivitas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai Upaya Mewujudkan Budaya K3. *Jurnal Administrasi Negara* Volume 3 No.3 halaman 34-43
- Akbar, M Fadli S., Putri, Eka C., Yusvita, V., Dwi, M., & Rusdy, R. 2020. Hubungan Pengetahuan Dan Pengawasan Dengan Perilaku Tidak Aman Pada Pekerja Bekisting PT Beton Konstruksi Wijaksana Tahun 2020. *IAKMI Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* Vol. 2 No. 2 Halaman 61-72
- Aseptua Gesima Silitonga , Astri Ayu Purwati, Ermina Rusilawati, Wella Sandria. 2022. Peran Upah, Pengawasan, Semangat Kerja dan K3 Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan PT. Mitra Unggul Pusaka. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi* Volume 3 No 1 Tahun 2022 Halaman 38-55
- Yunus Alfiansah, Bina Kurniawan, Ekawati. 2020. Analisis Upaya Manajemen K3 Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi Pt. X Semarang. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)* Volume 8, Nomor 5, September 2020